



Tuntaskan PBBP2 Rp 26,3 M, Dispenda Gandeng Bank BPD

AMLAPURA, NusaBali

Guna menuntaskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp 26,3 miliar, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Karangasem kerja sama dengan Bank BPD Bali Cabang Karangasem. Teknisnya dengan mendekatkan pelayanan bayar PBBP2 melalui LPD terdekat. Sebab LPD merupakan binaan dari BPD.

Kadispenda Karangasem I Nengah Toya, menjelaskan, tunggakan PBBP2 sejak tahun 2011, yakni sejak pemerintah pusat melimpahkan kewenangan memungut dan memanfaatkan PBBP2 ke kabupaten terakumulasi Rp 26,3 miliar. Awalnya selama 2011-2014 sebesar Rp 24 miliar, tahun 2015 tunggakan sebesar Rp 9 miliar. Setelah terbayar Rp 6,7 miliar, sisa tunggakan di 2015 Rp 2,3 miliar. Total tunggakan jadi Rp 26,3 miliar.

"Tunggakan dari tahun ke tahun memang bertambah. Kami juga tengah mengecek ketetapan pajak itu, agar datanya benar-benar valid. Ini demi menghindari terjadinya penghitungan ganda," jelas Nengah Toya di Amlapura, Jumat (15/7).

Sementara, lanjut Nengah Toya, ditemukan 168.000 wajib pajak PBBP2. Dia mencurigai, dari tunggakan pajak tersebut bisa saja ada yang subjeknya tidak ditemukan, karena beralih kepemilikan. "Makanya, sambil menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penagihan, juga melakukan perbaikan data base tunggakan pajak," imbuhnya.

Nantinya setelah data benar-benar



IB Nyoman Ari Suryantara



I Nengah Toya

line, 37 desa dinas lainnya belum. Sedangkan di Karangasem terdapat 190 LPD di tiap desa pakraman, sedangkan 67 LPD kondisinya belum stabil.

Sejak diberlakukannya ketentuan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak, maka kewenangan memungut PBBP2 diserahkan ke kabupaten, berlaku sejak 2011. Tetapi di Karangasem baru menerima kewenangan itu pada 2015.

Khusus untuk realisasi PBBP2 di Karangasem selama tiga tahun terakhir, 2013 sebesar Rp 4,5 miliar, tahun 2014 sebesar Rp 5,8 miliar, dan 2015 sebesar Rp 6,7 miliar. Sedangkan target tahun 2016 sebesar Rp 6,8 miliar.

Di bagian lain Kepala BPD Cabang Karangasem Ida Bagus Nyoman Ari Suryantara menyambut positif kerjasama itu. "Jumat (22/7) kami menggelar gathering dengan LPD se-Karangasem. Soal perangkat online, tidak masalah, semua LPD di Karangasem manajemennya sudah baik," ucapnya. **k16**

valid, barulah memantapkan kerja sama dengan Bank BPD. Teknis pelayanannya melalui LPD sebagai perpanjangan tangan di tingkat desa. "Sehingga masyarakat yang hendak bayar pajak, cukup di LPD secara online. Sehingga memudahkan masyarakat bayar pajak, juga melakukan pendekatan pelayanan," lanjut Nengah Toya.

Salah satu syarat memudahkan pelayanan, LPD bersangkutan mesti dilengkapi aplikasi online. Sementara dari 75 desa dinas, baru terdata di 38 desa dinas yang LPD-nya telah memanfaatkan teknologi on-